

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 167
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2002, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Armico.
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdaya Rakyat*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- _____, 2003, *Otonomi Daerah; merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hariyono, H.S, 2002, *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Peradaban.
- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kansil C.S.T, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Malayu S.P Hasibuan, 2011, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurmi Chatim, 2006, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rina Martini, 2012, *Birokrasi dan Politik*, Jakarta : UPT UNDIP Press.
- Sadu Wasistiono, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokusmedia.
- Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85

Suwandi, 2005, *Menggagas Otonomi Daerah di Masa Depan*, Jakarta: Samitra Media Utama.

Syaukani dkk, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wasistiono Sadu, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*, Bandung: Fokus Bandung.

Widjaya H.A.W, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cet. II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kelurahan.

C. Jurnal

Achmad Fauzi, 2019, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik", Jurnal Spektrum Hukum Vol. 16 No. 1

Asri B dan Adee Fatahilsh, 2019, "Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah", Jurnal Registratie Vol. 1 No. 1

Delfina Gusman, 2023, Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif, Jurnal Hukum Vol. 5, No. 3

H. Rahyunir Rauf, 2017, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 1

Septian Doni dan Okparizan, 2017, “Kewenangan Kelurahan Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2

Ni’ Matul Huda, 2009, “Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16. No. Edisi khusus

D. Skripsi

Hadari Nawawi, 2000, Penelitian Terapan, Skripsi, Yogyakarta: Gajah Mada University.

Priokta Dwisuda, 2014, Kedudukan dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bandung: Universitas Pasundan.

Rasyid, M, 1992, Pembangunan Kualitas dan Usaha - Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah, Skripsi, Universitas Tadulako : Palu.

Tommy Hendra Purwara, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Skripsi, Jakarta: Universitas Atma Jaya.

E. Internet

administrator <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>

administrator <https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer>

